

Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI

Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S atau dalam Kurikulum 2013 ditulis G30S/PKI merupakan materi kontroversial dalam sejarah Indonesia. Materi tersebut perlu untuk terus dipelajari guna membangun kesadaran kritis siswa yang menjadi tujuan penting dari pembelajaran sejarah kontroversial.

Pembelajaran materi G 30 S menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Materi tersebut merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia. Para ahli menyarankan agar pembelajarannya tidak sebatas metanaratif, melainkan narasi historistik yang bertumpu pada hari ini.

Pembelajaran materi G 30 S diharapkan semakin dapat membangun kesadaran kritis siswa melalui keterampilan berpikir kritis, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi. Di berbagai media, termasuk media sosial, berkembang berbagai wacana dan narasi sebagai implikasi era Revolusi Industri 4.0 dan era *post truth*. Diperlukan transformasi pembelajaran yang lebih dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills/HOTS*) sehingga dapat semakin membangun kesadaran kritis siswa.



Penerbit UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kku.unipma.ac.id



Dr. Yudi Hartono, M.Pd & Khoirul Huda, M.Pd



Dr. Yudi Hartono, M.Pd
Khoirul Huda, M.Pd

Sejarah Kontroversial G-30-S/PKI

*Konstruksi Materi &
Praksis Pembelajaran*

Dr. Yudi Hartono, M.Pd
Khoirul Huda, M.Pd

Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI
Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran



Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI

Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran

Penulis:

Dr. Yudi Hartono, M.Pd

Khoirul Huda, M.Pd

Editor:

Sri Anekani, S.Pd.I

Perancang Sampul:

Muhammad Cahya P

Penata Letak:

Muhammad Cahya P

Cetakan Pertama, November 2020

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

Telp (0351) 462986, Fax (0351) 459400

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-89-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S atau dalam Kurikulum 2013 ditulis G30S/PKI merupakan materi kontroversial dalam sejarah Indonesia. Materi tersebut perlu untuk terus dipelajari guna membangun kesadaran kritis siswa yang menjadi tujuan penting dari pembelajaran sejarah kontroversial.

Pembelajaran materi G 30 S menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Materi tersebut merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia. Para ahli menyarankan agar pembelajarannya tidak sebatas metanaratif, melainkan narasi historistik yang bertumpu pada hari ini.

Pembelajaran materi G 30 S diharapkan semakin dapat membangun kesadaran kritis siswa melalui keterampilan berpikir kritis, terlebih dengan perkembangan teknologi infomasi. Di berbagai media, termasuk media sosial, berkembang berbagai wacana dan narasi sebagai implikasi era Revolusi Industri 4.0 dan era *post truth*. Diperlukan transformasi pembelajaran yang lebih dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills/HOTS*) sehingga dapat semakin membangun kesadaran kritis siswa.

Buku ini menelaah konstruksi materi G 30 S dalam buku pelajaran, praksis pembelajaran di sekolah, dan praktik sosialnya di tengah masyarakat. Buku merupakan pengembangan hasil Penelitian Dasar Kompetitif Nasional Dikti Tahun 2019-2020. Buku diharapkan dapat memperkaya khasanah sejarah kontroversial, terutama G 30 S, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan materi, dan transformasi pembelajaran yang sejalan jiwa zaman.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi yang mendanai penelitian ini.. Terima kasih kepada para Kepala Sekolah SMA, guru, siswa, dan masyarakat Kabupaten dan Kota Madiun atas kerjasamanya selama penelitian ini.

Semoga bermanfaat. Amin.

Madiun, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
Bab 1 KONTROVERSI SEJARAH G 30 S.....	1
A. Pengertian Sejarah Konstroversial.....	1
B. Kategorisasi Sejarah Kontroversial.....	3
C. Sejarah Konstroversial G 30 S.....	8
Bab 2 KONTRUKSI MATERI SEJARAH G 30 S.....	13
A. Konstruksi materi.....	13
B. Tujuh Versi Peristiwa G 30 S.....	18
Bab 3 MODEL PEMBELAJARAN MATERI SEJARAH KONTROVERSIAL	23
A. Penguatan Pendidikan Karakter.....	23
B. Tantangan Guru	25
C. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran.....	29
D. Model Pembelajaran.....	36
Bab 4 PEMBELAJARAN SEJARAH KONTROVERSIAL G 30 S DI SMA KABUPATEN DAN KOTA MADIUN.....	42
A. Metode Pembelajaran	42
B. Analisis Wacana Kritis	46
1. Dimensi teks/materi.....	47
2. Dimensi praktik wacana.....	51
3. Dimensi praktik sosial.....	54
Bab 5 REPRODUKSI PENGETAHUAN G 30 S.....	60
A. Proses Reproduksi Pengetahuan.....	60
B. Perspektif Sosiologi Pengetahuan.....	64
Bab 6 TRANSFORMASI PEMBELAJARAN MATERI	

G 30 S.....	67
A. Keterampilan Berpikir Kritis.....	67
B. Transformasi pembelajaran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	86
GLOSARIUM	94
INDEKS.....	97
BIODATA PENULIS.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Posisi Materi Sejarah Kontroversial G 30 S dalam Kurikulum 2013 SMA.....	13
Tabel 2. Tujuh versi interpretasi peristiwa G 30 S.....	19

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Model tranfosmasi pembelajaran materi sejarah kontroversial.....	85

Bab 1

KONTROVERSI SEJARAH G 30 S

A. Pengertian Sejarah Konstroversial

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S atau dalam Kurikulum 2013 G 30 S/PKI merupakan materi kontroversial dalam sejarah Indonesia. Muessig menjelaskan isu-isu kontroversial sebaagi sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh seseorang atau kelompok yang lain (Matitaputty, 2016:188). Dalam ilmu sejarah dikenal sejarah kontroversial.

Sejarah kontroversial adalah narasi terhadap suatu peristiwa sejarah yang memiliki ragam penjelasan atau versi. Penjelasan yang beragam terhadap suatu peristiwa sejarah menjadi akar dari kontroversi (Ahmad, 2012). Antara penjelasan satu dengan yang lain masing-masing memiliki landasan yang kuat menurut penulisnya. Penulisan sejarahnya pun masih terus berproses, yang pada akhirnya memunculkan beberapa pendapat yang berbeda berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah (Ahmad, 2010:34).

Sejarah tidak pernah lepas dari kontroversi. Kontroversial dalam sejarah adalah suatu keniscayaan (Purwanto, 2009:1), dalam pengertian sejarah sebagai cerita. Hal ini karena sejarah merupakan kajian interpretatif terhadap sebuah peristiwa. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran baru terbuka untuk dilakukan (Ahmad, 2013). Sebagai contohnya adalah kontroversi peristiwa G 30 S yang muncul pasca Orde Baru mengenai siapa dalang dibalik peristiwa tersebut.

Kochar (2008:450-451) menegaskan bahwa faktor subjektif yang terkandung dalam interpretasi sejarawan dalam mengolah fakta yang ditemukan merupakan

penyebab lahirnya kontroversi. Di dalam sejarah, semakin banyak menginterpretasikan masa lalu dengan bantuan masa sekarang, semakin besar pula kemungkinan menemukan isu-isu yang kontroversial.

Fakta sejarah yang digunakan oleh sejarawan untuk menulis historiografi tentang masa lalu sebenarnya adalah konstruk yang dibuat oleh sejarawan itu sendiri dan otomatis mengandung faktor subjektif (Kartodirdjo, 1992:88).

Ahmad (2010) mengidentifikasi dua faktor dalam historiografi sejarah kontroversial, yakni faktor metodologis dan faktor kepentingan sosio-politik. Pada aspek metodologis, kontroversi disebabkan oleh subjektivisme. Subjektivisme berbeda dengan subjektivitas. Subjektivitas dalam penelitian merupakan sebuah keniscayaan karena faktor-faktor yang melekat pada diri sejarawan. Sedangkan subjektivisme adalah sebuah kekeliruan. Subjektivisme merupakan tindakan yang tidak proporsional dari seorang sejarawan dalam memilih, mereduksi, dan menafsirkan data. Secara metodologis, sejarawan harus berhati-hati terhadap kecenderungan sumber yang bias, terutama pada peristiwa kontroversial yang bersifat kontemporer.

Notosusanto (1978) menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan rekaman jejak masa lalu menjadi bias. *Pertama*, adanya perbedaan persepsi antara pelaku satu dengan lainnya; *Kedua*, adanya sengketa pribadi, yaitu adanya pertentangan antara pelaku dengan pelaku lain; *Ketiga*, para pelaku yang sudah tua akan menjadi pikun (pelupa) sehingga ingatannya sudah kabur; *Keempat*, pretensi, yaitu adanya sikap dari para pelaku yang lebih suka menonjolkan peranan dirinya daripada orang lain.

Aspek yang kedua yang menyebabkan munculnya sejarah kontroversial adalah aspek sosial-politik. Pada aspek ini, kontroversi muncul sebagai konsekuensi atas kepentingan sosial dan politik terhadap suatu peristiwa.

Dominasi politik yang mengendalikan sejarah diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kontroversi sejarah.

Selain disebabkan oleh faktor dominasi kekuasaan, sejarah kontroversial juga disebabkan oleh kepentingan salah satu golongan terhadap suatu narasi sejarah. Kepentingan itu bisa datang dari pihak-pihak yang terlibat dalam satu peristiwa sejarah ataupun dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan satu peristiwa sejarah untuk tujuan-tujuan tertentu. Kepentingan yang datang dari pihak pelaku sejarah ataupun keturunannya karena pelaku sejarah merasa dirugikan dengan adanya penulisan sejarah dari pihak tertentu (Ahmad, 2013).

Ahmad (2013) menyimpulkan bahwa sejarah kontroversial merupakan narasi sejarah yang memiliki perbedaan antar satu dan lainnya dalam melihat suatu peristiwa. Sejarah kontroversial muncul ketika terjadi perbedaan metodologis dalam penelitian sejarah dan konflik kepentingan yang melatarbelakangi munculnya perbedaan persepsi dan narasi. Beberapa referensi menyatakan bahwa sejarah kontroversial juga bersifat emotif dan "*high risk*" sehingga perlu kehati-hatian dalam pengungkapannya di dalam tengah masyarakat.

B. Kategorisasi Sejarah Kontroversial

Ditinjau dari sifatnya, sejarah kontroversial dapat dikategorikan dalam dua karakteristik utama, yakni sejarah kontroversial akademik dan sejarah kontroversial sosial-politik (Ahmad, 2012). Sejarah kontroversial akademik memberikan perhatian pada perbedaan interpretasi sejarawan terhadap sumber sejarah. Perdebatan dalam kategori ini lebih banyak terjadi di kalangan sejarawan

daripada masyarakat, walaupun kadangkala masyarakat terkena imbas dari perdebatan ini.

Secara khusus, masyarakat sebenarnya tidak memiliki keterlibatan dan kepentingan secara langsung terhadap isu tersebut. Beberapa contoh peristiwa dalam kategori sejarah kontroversial ini adalah perbedaan pendapat tentang masuknya pengaruh India dan Islam di Nusantara.

Karakteristik sejarah kontroversial kategori kedua adalah kontroversial sosial-politik. Dalam kategori ini Ahmad (2012) menjelaskan bahwa terdapat kepentingan personal/komunal, sosial, kultural, dan politik dalam sejarah. Kontroversi diduga sebagai kulminasi dan konsekuensi dari konflik kepentingan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa peristiwa di masa lalu masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepentingan personal/komunal, masyarakat, budaya, dan politik pada masa kini. Contohnya adalah peristiwa G 30 S, yang memunculkan berbagai versi yang berbeda dengan yang selama ini berkembang.

Ditinjau dari pengaruhnya terhadap masyarakat pada masa sekarang, ada dua jenis sejarah kontroversial. Kategori pertama adalah kontroversi sejarah yang terjadinya pada kurun waktu yang lama dari sekarang atau disebut juga sejarah nonkontemporer. Kategori kedua adalah sejarah kontroversial yang terjadinya pada masa kontemporer (Ahmad, 2009).

Sejarah kontroversial kategori pertama dikarenakan adanya perbedaan pendapat, teori, atau pendekatan yang dilakukan sejarawan dalam melakukan penulisan sejarah. Secara umum, adanya perbedaan pandangan itu menurut tipologi Asvi Warman Adam (2009:101-106) hanya disebabkan adanya ketidaktepatan dan ketidaklengkapan fakta dan interpretasi yang dilakukan, dan biasanya ketidaktepatan itu muncul setelah ada beberapa sejarawan

yang mengungkapkan ketidaktepatan itu menurut versi sejarawan itu. Artinya sifat kontroversial ini sangat tergantung dari sejarawan. Hal ini karena pada kategori ini tidak terdapat sumber primer berupa pelaku atau saksi sejarah, sehingga sejarawan memainkan peranan penuh dalam menuliskan suatu peristiwa sejarah. Contohnya pada mitos tentang penjajahan nusantara selama 350 tahun yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sejarah kontroversial kategori kedua adalah sejarah yang biasanya dimasukkan ke dalam kategori sejarah kontemporer. sejarah Indonesia kontemporer dengan isu kontroversi dapat diartikan sebagai sejarah yang rentang waktu terjadinya tidak terlalu lama dengan masa sekarang, dimana dalam penulisannya masih berproses, yang pada akhirnya memunculkan beberapa pendapat yang berbeda berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah (Ahmad, 2010:34). Batasan kontemporer ini belum jelas, akan tetapi bila ditinjau dari saat ini peristiwa sejarah kontemporer adalah mulai tahun 1940-an.

Sejarah kontemporer cenderung bersifat kontroversial karena kadar subjektivitas yang terkandung dalam sejarah kontemporer lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. Hal ini karena pelaku atau saksi sejarahnya masih ada dan masih memiliki satu implikasi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat pada masa ini (Ahmad, 2007:3). Selain itu hal yang menyebabkan kontroversial adalah bahwa peristiwa sejarah kotemporer masih belum selesai sepenuhnya, tetapi senantiasa berproses. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa masih banyak terjadi perbedaan pandangan para pelaku sejarah berkaitan dengan satu peristiwa sejarah, dan ada pula perbedaan pandangan antara temuan berupa fakta-fakta baru dengan pemahaman masyarakat yang berkembang selama ini.

Sejarah kontemporer menjadi bersifat kontroversial karena adanya perbedaan pendapat, teori, atau pendekatan yang dilakukan sejarawan dalam melakukan penulisan sejarah. Secara umum, adanya perbedaan pandangan itu menurut tipologi Asvi Warman Adam (2009:101-106) disebabkan adanya ketidaktepatan dan ketidaklengkapan fakta dan interpretasi interpretasi yang dilakukan dalam penyusunan suatu tulisan sejarah.

Beberapa peristiwa sejarah kontemporer yang termasuk dalam sejarah kontroversial yang dapat dijadikan materi pembelajaran di kelas sejarah antara lain kontroversi tentang penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, peristiwa Madiun 1948, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, peristiwa 17 Oktober 1952, Gerakan 30 September, perdebatan seputar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), peristiwa Malari 1974, permasalahan Timor-Timur, sampai dengan peristiwa seputar reformasi dan jatuhnya Soeharto pada 1998. Akan tetapi yang paling banyak diperdebatkan di masyarakat adalah Gerakan 30 September, Supersemar, dan Serangan Umum 1 Maret 1949 (Adam, 2007:1-4).

Peristiwa lahirnya surat perintah tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) menjadi kontroversi sejarah. Mengapa Presiden Soekarno serta merta dan dengan mudah mau menandatangani draf surat perintah dihadapan para pembantunya. Peristiwa ini sebetulnya merupakan tragedi dari karier politik Soekarno. Soekarno tidak lagi mampu menghadapi tekanan politik yang begitu dahsyat seorang diri.

Draf surat perintah yang tidak memenuhi syarat administratif tersebut disahkan menjadi surat perintah resmi. Penandatanganan surat perintah secara langsung oleh Presiden tanpa lewat prosedur administrasi, kemudian menimbulkan pelbagai tafsir dan versi. Isi surat perintah

intinya memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto Menteri/Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi: Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, serta melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Kategorisasi sejarah kontroversial menurut Kochhar (2008) ada dua jenis, yakni (1) kontroversial mengenai fakta-fakta dan (2) kontroversial mengenai signifikansi, relevansi, dan interpretasi sekumpulan fakta. Isu kontroversial jenis pertama, yakni kontroversi mengenai fakta-fakta terjadi karena kurangnya data atau tidak masuk akal nya suatu penemuan. Di dalam isu kontroversial jenis ini pertanyaan berkaitan dengan "apa", "siapa", "kapan", dan "di mana".

Jenis isu kontroversial kedua adalah kontroversi yang disebabkan oleh interpretasi. Hal ini karena pendekatan yang dilakukan oleh sejarawan tidak ilmiah, bias, dan dipengaruhi prasangka. Kontroversi yang disebabkan oleh interpretasi berada pada pertanyaan tentang "mengapa" dan "bagaimana" peristiwa tersebut terjadi. Terkadang peristiwa atau fenomena dipelajari secara tertutup, sehingga interpretasi sejarawan terhadap suatu peristiwa bisa salah dan mengakibatkan kontroversi.

Permasalahan kontroversi karena perbedaan interpretasi sejarawan terjadi seperti ketika sejarawan-sejarawan mengeluarkan versi yang berbeda tentang peristiwa G 30 S. Ada sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena konflik internal di tubuh Angkatan Darat, ada pula yang menyatakan bahwa Soeharto yang menjadi dalang. Sementara itu muncul pula teori tentang keterlibatan Sukarno atau CIA sebagai faktor

yang utama. Sementara versi resmi pemerintah adalah bahwa yang menjadi aktornya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

C. Sejarah Konroversial G 30 S

Berbagai studi telah mengungkap secara detail peristiwa G 30 S seperti Anderson & McVey (1971), Robinson (1995), Roosa (2006). Secara ringkas, peristiwa G 30 S merupakan dampak polarisasi kelompok di Indonesia (Gerlach, 2010). Perspektif yang baru menilai peristiwa G 30 S bukan peristiwa politik semata, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia (Wahyuningroem, 2013).

Pada malam tanggal 30 September 1965, enam jenderal senior dan seorang letnan diculik dan dibunuh. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam percobaan kudeta adalah pejabat militer menengah dan rendah, dan gerakan tersebut dengan cepat dimentahkan oleh elemen lain di angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto (Gerlach 2010: 17). Setelah kudeta tersebut, menyusul terjadi kekerasan terhadap kelompok yang diasosiasikan dengan kudeta tersebut.

Interpretasi terhadap peristiwa tersebut cukup beragam. Selain versi pemerintah Orde Baru yang memosisikan PKI sebagai aktornya, terdapat versi lain dalam memaknai peristiwa tersebut. *Pertama*, versi para akademisi Cornell University, Amerika Serikat, yang dikenal dengan *Cornell Paper*. Menurut versi ini, Gerakan 30 September 1965 merupakan masalah internal Angkatan Darat, khususnya kelompok militer dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Peristiwa itu lebih merupakan revolusi perwira menengah yang berasal dari Divisi Diponegoro terhadap para perwira tinggi Divisi Diponegoro. Ketidakpuasan mereka menyangkut nilai-nilai, etika, dan semangat revolusi 1945 dimana kesederhanaan, kejujuran,

solidaritas, kesetiaan, dan nilai-nilai hidup ideal lainnya merupakan tolok ukur utama bagi perwira sejati dimanapun dan kapan pun berada.

Kedua, versi sejarawan Barat Antonie C.A. Dake yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama dari Gerakan 30 September 1965 adalah Presiden Soekarno. Angkatan Darat selalu berseteru, baik secara diam-diam maupun terang-terangan dengan Presiden Soekarno yang sudah menjadi rahasia umum sejak zaman revolusi. Jendral Soedirman sendiri sudah menunjukkan perilaku politik yang dalam banyak hal bertentangan dengan pemerintah dan politisi sipil, termasuk dengan Presiden Soekarno sendiri (Said, 2015: 37-53). Soekarno merasa perlu menegur para jendral Angkatan Darat yang membangkang, sehingga “merestui” tindakan Letkol Untung untuk “mengamankan” para Jendral Angkatan Darat pada 30 September 1965.

Ketiga, versi sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim yang menyatakan bahwa dalang Gerakan 30 September 1965 adalah Jenderal Soeharto. Hal itu dibuktikan bahwa ketiga pelaku utamanya yaitu Kolonel Untung, Letkol Latief, dan Syam Kamaruzaman adalah bekas anak buah dan teman baik Soeharto sejak zaman revolusi. Tokoh-tokoh intel tersebut sengaja disusupkan Angkatan Darat untuk memprovokasi tindakan PKI yang sudah lama menjadi musuh Angkatan Darat.

Keempat, versi mantan pejabat intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott, yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh CIA. Sejak Soekarno mengemukakan gagasan perlunya sistem politik Demokrasi Terpimpin (1956), ia meminta bantuan Uni Soviet untuk membebaskan Irian Barat (1962), membentuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang dan konfrontasi dengan Malaysia

(1964). Amerika Serikat tidak senang dengan tindakan-tindakan Soekarno yang ingin menjadi pemimpin baru bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Kahin, 1997: 295-301).

Selama beberapa dekade (1966–1998), masyarakat Indonesia hanya diberi tahu satu versi resmi dari G 30 S. Setelah dimulainya gerakan Reformasi, narasi tunggal kenegaraan tahun 1965 mulai diperebutkan oleh narasi-narasi lain, terutama oleh cerita-cerita terkait kudeta dan kekerasan yang mengikutinya, yang biasa disebut sebagai “Tragedi 1965”. Bukti dan dokumentasi baru muncul sehubungan dengan kudeta tersebut, dan perspektif baru telah muncul yang mengkaji tragedi tersebut tidak hanya sebagai peristiwa politik semata, tetapi juga sebagai kasus pelanggaran HAM massal (Wahyuningroem, 2013: 120).

Gerlach menyebut tragedi 1965 termasuk di antara “pembersihan anti-komunis paling berdarah di abad kedua puluh” (Gerlach 2010: 87). Pembunuhan itu dilakukan oleh militer dan oleh warga sipil yang tergabung dalam milisi yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik dan kelompok agama. Pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia, dengan perkiraan jumlah kematian tertinggi di pulau Jawa. Perkiraan jumlah orang yang terbunuh selama pembersihan ini berkisar dari 100.000 hingga lebih dari satu juta (Cribb 1990: 12).

Menurut Amnesty International antara 500.000 dan satu juta orang terbunuh dan sekitar satu juta lainnya ditahan atas dasar dugaan keterlibatan mereka dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) setelah percobaan kudeta oleh Gerakan 30 September. Beberapa ratus ribu orang ditahan tanpa pengadilan, dalam beberapa kasus hingga 14 tahun (Amnesty International 1994: 6). Menurut Chandra (2017: 71) pembersihan anti-komunis tahun 1965–1966 merupakan satu-satunya peristiwa politik paling traumatis di Indonesia

merdeka, dengan perkiraan konsensus sekitar 500.000 kematian.

Pasca Reformasi, di kalangan publik berbagai corak hipotesis-kesejarahan diajukan. Siapakah yang berada di belakang pembunuhan para jenderal yang terjadi di subuh tanggal 1 Oktober 1966 itu? Apakah betul peristiwa itu dikendalikan oleh PKI? Memang demikianlah faktanya, kata sejarawan resmi dari Orde Baru. Dengan dukungan kekuasaan masalah ini pun dianggap telah selesai. Di belakang G-30-S (nama kelompok yang membunuh) ditambahkan saja kata PKI, maka jadilah G-30-S/PKI sebagai suatu keutuhan. Tetapi, kalau demikian, mengapa seperti itu? Apakah yang terjadi sesungguhnya? Bukankah secara politik PKI sedang berada di atas angin, karena hubungan PKI dengan Presiden Sukarno cukup baik dan agak renggang dengan ABRI? Apakah mungkin kebenaran sejarah (*historical truth*) yang otentik bisa didapatkan? Banyak artikel dan buku, baik tulisan ilmuwan asing, maupun sejarawan profesional atau amatir dalam negeri, yang telah disampaikan ke wilayah publik, tetapi kontroversi masih belum berhenti (Abdullah dkk, 2015:21).

Perdebatan tentang siapa yang berada di belakang layar masih terus berlanjut, tetapi sementara itu kisah dan kenangan tentang konflik berdarah atau bahkan penganiayaan dan pembunuhan anak bangsa ketika terjadi "pembersihan" dari anasir-anasir yang diketahui, atau dianggap atau dituduh komunis telah semakin terbuka juga. Jumlah korban, sifat dan corak "pembersihan" telah semakin diketahui. Hanya saja dalam proses ini, ketika peristiwa sejarah hendak diungkapkan sepenuhnya, dendam sejarah belum berlalu dan hilang.

Menurut Ricklefs (2001:427) karena rumitnya situasi politik, hubungan-hubungan dan perasaan-perasaan benci